



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WALUYO HANDOKO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR IV BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUMAS
3. NHK : 867397

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.010.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m²/200 m² di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m²/280 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 1008 m² di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah Seluas 448 m² di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1319 m²/68 m² di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 367.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR 150 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
3. MOBIL, HONDA CITY HB 1.5 L RSCVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BBP-A A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 220.074.474



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.597.074.474
III. HUTANG	Rp.	81.816.097
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.515.258.377

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.